

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengamanan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 yang didalam pengamanan aset tersebut terdiri dari proses pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena adanya Temuan BPK-RI pada beberapa aset tetap yang pada tahapan pelaksanaan belum dijalankan secara efektif sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016.
2. Pengamanan administrasi telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 namun dalam tahapan menghimpun, mencatat, dan melengkapi dokumen belum sesuai dengan permendagri No 19 tahun 2016.
3. Pengamanan fisik terhadap aset tetap berupa tanah telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende mulai dari pemasangan patok, papan tanda kepemilikan serta rutin dalam melakukan penjagaan di lokasi aset dengan melakukan survey sebanyak 2-3 kali dalam sebulan.

4. Pengamanan hukum telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016 terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.
5. Faktor penyebab atau kendala dalam proses pengamanan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang aturan hukum yang mengatur pengamanan aset, komitmen serta pengawasan pimpinan dalam proses pengamanan aset tetap, Secara umum faktor-faktor itulah yang menyebabkan pengamanan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menjadi temuan BPK.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dalam pengamanan aset hendaknya segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI terhadap temuan aset tetap yang terjadi, agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya.
2. Untuk pengamanan aset tetap yang lebih optimal direkomendasikan agar melakukan upaya peningkatan kinerja pengurus barang dengan membuat kebijakan maupun peraturan yang mendukung program-program peningkatan etos kerja dan disiplin pengurus barang serta dibutuhkan komitmen dalam pengamanan aset tetap.

3. Untuk permasalahan bukti pendukung yang sah diharapkan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dalam merencanakan dan meningkatkan target aset tetap yang akan disertifikasi atau dilengkapi bukti pendukungnya. Selain itu untuk dokumen yang ada agar disimpan dengan baik dengan memperhatikan faktor keamanan dokumen agar tidak rusak atau hilang.
4. Untuk permasalahan yang belum dilakukan pengamanan aset tetap sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende perlu melakukan dan melengkapi data aset tetap secara lebih rinci dan akurat.